

ABSTRAK

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) TINGKAT KECAMATAN

**(Studi pada Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara)**

Oleh :

**HENDRI US
NPM. 0726021019**

Perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu instrumen yang menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan di daerah. Untuk melaksanakan pembangunan di daerah diperlukan berbagai tahapan yang pada dasarnya dimulai dari kegiatan perencanaan. Baik atau buruknya perencanaan yang ditetapkan tentunya akan sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan atau kegagalan pembangunan daerah itu sendiri. Semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, forum perencanaan pembangunan dan penganggaran yang partisipatif dengan pola *bottom up* tersebut berubah namanya menjadi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan ditingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan kegiatan prioritas dari desa/kelurahan serta menyepakati rencana kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan yang bersangkutan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Kecamatan dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota pada tahun berikutnya. Untuk itu penulis merasa perlu melakukan penelitian terkait dengan Musrenbang Kecamatan ini dengan tujuan untuk mendeskripsikan partisipasi masyarakat serta melihat letak tangga partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Arnstein.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin memperoleh gambaran tentang partisipasi masyarakat pada Musrenbang di Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data melalui tahap reduksi data, penyajian data, kemudian verifikasi data.

Hasil pembahasan mengenai partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan, yaitu : Partisipasi masyarakat yang terkait dengan keterlibatan masyarakat dalam tahap persiapan Musrenbang yakni pada saat Tim/Panitia Pelaksana Musrenbang Kecamatan mensosialisasikan terkait rencana pelaksanaan Musrenbang. Bentuk partisipasi masyarakat dalam tahap ini adalah tergolong partisipasi secara langsung yaitu masyarakat terlibat langsung dalam musyawarah tingkat desa/kelurahan, masyarakat ikut berperan serta dalam kegiatan tersebut. Dalam tahap pelaksanaan Musrenbang Kecamatan partisipasi masyarakat kecamatan Kotabumi Selatan dalam bentuk mengikuti proses musyawarah dalam membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang dari tingkat desa/kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan Kotabumi Selatan, selain itu partisipasi masyarakat dalam bentuk bagaimana membahas dan menetapkan kegiatan prioritas pembangunan di tingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa/kelurahan. Dalam tahap pelaksanaan masyarakat kecamatan Kotabumi Selatan berpartisipasi dalam bentuk pemikiran ini ditandai dengan adanya keinginan masyarakat menentukan prioritas kegiatan yang benar-benar merupakan persoalan dan kebutuhan yang harus segera ditanggulangi.

Letak tangga partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Kotabumi Selatan pada Tahap persiapan Musrenbang Kecamatan berada pada level "Penyampaian Informasi". Sedangkan tahap pelaksanaan Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Kotabumi Selatan, berada pada tingkat "Penentruman". Sehingga dapat disimpulkan Letak Tangga Partisipasi masyarakat Kecamatan Kotabumi Selatan dalam Musrenbang Kecamatan berada pada tingkat "Tokenisme/Hadiah". dengan alasan masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan ini belum sepenuhnya diberikan wewenang untuk menentukan perencanaan pembangunan. Masyarakat melalui forum musyawarah pembangunan yang difasilitasi oleh pihak pemerintah seolah-olah telah dilibatkan namun pada kenyataannya posisi masyarakat dalam kegiatan ini hanya menjalankan mekanisme proses musyawarah pembangunan yang telah ditetapkan.

Kata Kunci : Partisipasi dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan